

**PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN
OLEH KAP *dbsd&a* CABANG YOGYAKARTA
PADA PT BPR “3SUN” PERIODE 2016**

Irsanudin Idrus

Universitas Nuku Tidore, Maluku Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui setiap tahapan dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik *dbsd&a* pada PT BPR 3SUN Periode 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif melalui kajian audit laporan keuangan PT BPR “3SUN”. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta telah memenuhi standar umum auditing, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan hasil audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Kata kunci: pelaksanaan audit, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Produk akhir dari suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang juga merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut harus dilaksanakan menurut cara tertentu yang lazim dan berterima umum serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi akuntansi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang digunakan oleh para pemakai sesuai kepentingan masing-masing. Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan maka penyusunan laporan keuangan tidak boleh memihak pada pihak tertentu dan harus disajikan sesuai kondisi yang sebenarnya, untuk itu pentinglah ada pihak

yang independen yang mampu menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku, tidak memihak dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai salah satu jenis bank, maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (*Right to Licences*), kewenangan untuk mengatur (*Right to Regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*Right to Control*), dan kewenangan untuk mengenai sanksi (*Right to Impose Sanction*). Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang

dilakukan sesuai dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

Tingkat kesehatan BPR dinilai dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR. Aspek tersebut meliputi permodalan, kualitas aset produksi, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas, serta faktor-faktor lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat, yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak diluar manajemen BPR, *window dressing*, praktek bank dalam bank, kesulitan keuangan, serta praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Kepengurusan BPR terdiri dari direksi dan komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) BPR untuk menilai integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban direksi atau pengurus BPR diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang disampaikan dalam laporan tahunan ketika Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota BPR. BPR juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bank Indonesia, dimana laporan keuangan tahunan termasuk didalamnya untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia maupun dalam RUPS dan Rapat Anggota adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dengan adanya permintaan atas jasa audit pada berbagai bentuk usaha maka Kantor Akuntan Publik mulai berkembang

di kota-kota besar, salah satunya adalah Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (*dbsd&a*). KAP *dbsd&a* sebagai Kantor Akuntan Publik yang bersifat independen memberikan jasa yang erat hubungannya dengan laporan keuangan. Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan KAP *dbsd&a* tidak memihak kepada pihak manapun, dan tanggung jawab auditor hanya sebatas pada pendapat atau opini yang dikeluarkan dan bukan mengenai kegiatan operasional perusahaan.

PT BPR 3SUN (bukan nama sebenarnya) merupakan salah satu BPR yang memberikan kepercayaan kepada KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta untuk melakukan audit terhadap laporan keuangannya. PT BPR 3SUN termasuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham yang tidak diperjual belikan di Pasar Modal (BEI). Atas dasar ini, maka BPR 3SUN dikelompokkan dalam Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemerikat kredit.

Pada 1 Juni 2010 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Surat edaran ini mengharuskan semua BPR di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Ketentuan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2010. Dengan ketentuan tersebut akuntan publik harus menilai kesesuaian asersi-asersi laporan keuangan BPR dengan SAK-ETAP.

Melihat pentingnya pernyataan atas kewajaran suatu laporan keuangan BPR, maka diperlukan pelaksanaan tahap-tahap audit sesuai dengan standar auditing yang ditentukan. Sebagaimana uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: Bagaimana pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik *dbsd&a* Yogyakarta pada PT BPR 3SUN Periode 2016.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui setiap tahapan dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik *dbsd&a* pada PT BPR 3SUN Periode 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Auditing

Secara umum *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Jusup, 2010).

Jenis-Jenis Audit

Menurut (Mulyadi, 2011), jenis audit berdasarkan tujuan dilaksanakan audit, dibagi menjadi tiga yaitu: Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*); Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*); dan Audit Operasional (*Operational Audit*). Sementara itu, jika dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, maka audit tersebut dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu audit eksternal, audit internal, dan audit sektor publik.

Kertas Kerja Audit

SA Seksi 339 *Kertas Kerja* paragraf 3 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut:

“Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya”. Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor (Mulyadi, 2011).

Menurut SA Seksi 339 *Kertas Kerja* Pragraf 5, kertas kerja harus cukup memperhatikan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang dapat diterapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan (Mulyadi, 2011):

- 1) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pemeriksaan yang telah direncanakan dan di supervisi dengan baik.
- 2) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atau pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
- 3) Telah dilaksanakannya standar lapangan ketiga yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Auditan.

Standar Auditing

Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing

atau suatu standar agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah sebagai berikut (IAPI, 2011):

1) **Standar Umum**

Standar umum berhubungan dengan kualifikasi kualitas auditor dan kualitas pekerjaan auditor. Standar umum terdiri atas tiga buah standar: Pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2) **Standar Pekerjaan Lapangan**

Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan pelaksanaan audit di tempat bisnis klien atau di lapangan. Standar ini juga terdiri dari tiga buah standar yang intinya sebagai berikut: Pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya. Kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) **Standar Pelaporan**

Dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat buah standar pelaporan yaitu: *Pertama*, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. *Kedua*, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Serta laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. *Keempat*, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

METODE PENELITIAN

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif melalui kajian audit laporan keuangan PT BPR “3SUN”. Proses pelaksanaan audit laporan keuangan yang disajikan oleh PT BPR “3SUN”, auditor melaksanakan:

1) Tahap Penerimaan Penugasan

Pada tahap penerimaan penugasan audit penulis tidak diikutsertakan karena pada tahap ini langsung dilakukan oleh manajer KAP *dbsd&a* atau bisa dilakukan oleh *supervisor* KAP *dbsd&a*.

2) Tahap Perencanaan Auditing

Penulis yang berperan sebagai auditor junior, pada tahap perencanaan auditing penulis tidak diikutsertakan didalamnya, penulis hanya mengetahui bahwa penawaran audit dan Perjanjian Kerja untuk melakukan audit laporan keuangan PT BPR 3SUN telah disetujui oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta.

3) Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, maka tim auditor memulai pelaksanaan audit laporan keuangan pada PT BPR 3SUN. Pada tahap ini penulis terlibat langsung dalam pemeriksaan. Audit dilaksanakan di KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta dan Kantor PT BPR 3SUN.

usaha. Adapun langkah yang dilakukan auditor sebagai berikut.

Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan kas bertujuan untuk membuktikan asersi manajemen mengenai kas. Asersi tersebut digolongkan menjadi asersi keberadaan kas (*assertion existence*), asersi kelengkapan pencatatan kas (*completense*), hak kepemilikan klien, kewajaran penilaian, penyajian, dan pengungkapan kas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP.

Dalam pemeriksaan kas, auditor meminta rincian kas dan setara kas pada periode berjalan. Selanjutnya auditor melakukan *vouching* untuk mencocokkan bukti transaksi dengan jurnal transaksi harian *teller* dan buku besar. Bukti transaksi yang digunakan adalah bukti transaksi kas masuk dan kas keluar dengan *sample vouching* masing-masing 10 (sepuluh) tanggal bukti transaksi yang diambil antara awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan yang juga diambil secara *random* sebagai *sample*. Pembuktian sah atau tidaknya suatu transaksi dibuktikan dengan adanya otorisasi dari pembayar, penerima, dan pihak lain untuk kas keluar.

Pada 5 Desember 2014 auditor melakukan *cash opname* untuk membuktikan keberadaan kas secara fisik yang dilakukan di Kantor PT BPR 3SUN, berita acara pemeriksaan kas terlampir pada lampiran 5. Auditor melakukan pengawasan terhadap perhitungan kas dengan memastikan lokasi pemegang, pemegang kas dan jumlah kas yang akan dihitung. Hasil yang diperoleh dari *cash opname* adalah Rp726.414.500 jumlah ini sama dengan catatan per *book* sehingga tidak terdapat selisih antara saldo per *book* dan hasil pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama-tama dalam melaksanakan pekerjaan lapangan auditor mengumpulkan bukti audit. Auditor mendapatkan data audit klien Tahun 2013 dari KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta dan dalam pengumpulan data audit di Kantor PT BPR 3SUN auditor tidak mendapatkan masalah yang berat dalam pengumpulannya. Langkah berikutnya, auditor mempelajari laporan keuangan PT BPR 3SUN.

Setelah mempelajari laporan keuangan klien, auditor memulai pemeriksaan terhadap kas, penempatan pada bank lain (setara kas), kredit yang diberikan, aset tetap, aset lain-lain, kewajiban, simpanan, pinjaman, ekuitas, pendapatan, dan beban

Tabel 1
Pemeriksaan Kas

Uraian		Jumlah	Total
Uang kertas IDR			
Rp	100.000	4378 Lembar	437.800.000
Rp	50.000	4654 Lembar	232.700.000
Rp	20.000	1420 Lembar	28.400.000
Rp	10.000	1704 Lembar	17.040.000
Rp	5.000	1058 Lembai	5.290.000
Rp	2.000	1102 Lembar	2.204.000
Rp	1.000	210 Lembar	210.000
Rp	500	Lusuh di Brankas	1.575.000
Rp	100	Lusuh di Teller	102.000
Uang logam IDR			
Rp	1.000	560 Keping	560.000
Rp	500	779 Keping	389.500
Rp	200	571 Keping	114.200
Rp	100	298 Keping	29.800
Total Cash Opname			726.414.500

Sumber: BAP Pemeriksaan Kas KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Pada 5 Desember 2014 berdasarkan laporan harian saldo awal kas sebesar Rp728.713.100,- kas masuk sebesar Rp360.297.093,- Kas keluar sebesar Rp362.595.693,-, dan saldo akhir sebesar Rp726.414.500. berdasarkan pemeriksaan *cash opname* yang dilakukan auditor jumlah tersebut dapat dibuktikan keberadaannya.

Karena pelaksanaan *cash opname* sebelum tanggal neraca yakni 31 Desember 2014. Maka auditor melakukan perhitungan *Trace Forward* untuk menelusuri dan memastikan bahwa kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah benar adanya. Perhitungan *Trace Forward* tersebut sebagaimana pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Trace Forward Kas

Keterangan	Saldo Awal	Kas Masuk (Debit)	Kas Keluar (Kredit)	Saldo Akhir
Transaksi kas pusat:				
Transaksi tanggal 5/12/2014	728.713.100	360.297.093	362.595.693	726.414.500
Transaksi tanggal 6/12/2014	726.414.500	108.089.234	162.326.434	672.177.300
Transaksi tanggal 8/12/2014	672.177.300	391.704.779	374.585.579	689.296.500
Transaksi tanggal 9/12/2014	689.296.500	89.325.395	178.418.095	600.203.800
Transaksi tanggal 10/12/2014	600.203.800	473.777.955	113.417.055	960.564.700
Transaksi tanggal 11/12/2014	960.564.700	1.659.368.513	1.877.365.413	742.567.800
Transaksi tanggal 12/12/2014	742.567.800	607.916.437	858.530.937	491.953.300

Transaksi tanggal 13/12/2014	491.953.300	77.771.000	71.497.300	498.227.000
Transaksi tanggal 15/12/2014	498.227.000	2.252.395.689	2.314.402.589	436.220.100
Transaksi tanggal 16/12/2014	436.220.100	720.608.906	659.502.606	497.326.400
Transaksi tanggal 17/12/2014	497.326.400	2.431.590.888	2.276.323.888	652.593.400
Transaksi tanggal 18/12/2014	652.593.400	100.359.975	373.663.375	379.290.000
Transaksi tanggal 19/12/2014	379.290.000	1.584.274.312	1.459.654.312	503.910.000
Transaksi tanggal 20/12/2014	503.910.000	164.255.250	313.086.250	355.079.000
Transaksi tanggal 22/12/2014	355.079.000	377.077.723	160,852,223	571.304.500
Transaksi tanggal 23/12/2014	571.304.500	107.980.037	309.014.637	370.269.900
transaksi tanggal 24/12/2014	370.269.900	906.282.269	596.107.969	680.444.200
transaksi tanggal 26/12/2014	680.444.200	523.150.518	562.765.918	640.828.800
Transaksi tanggal 27/12/2014	640.828.800	348.425.682	295.927.682	693.326.800
transaksi tanggal 29/12/2014	693.326.800	710.784.350	722.227.750	681.883.400
Transaksi tanggal 30/12/2014	681.883.400	322.917.680	151.624.880	853.176.200
Transaksi tanggal 31/12/2014	853.176.200	134.572.510	479.731.510	508.017.200
kas atm pusat				30.300.000
saldo kas cabang Bantul				238.535.900
Saldo kas Cabang Mangkubumi				288.556.300
saldo kas konsolidasian per tanggal 31/12/2014				1.065.409.400

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Berdasarkan perhitungan kas di atas oleh auditor, jumlah kas di brankas dan di bank per *book* sebesar Rp1.065.409.400,- terdiri dari *cash opname* di brankas Kantor Pusat sebesar Rp508.017.200,- Kas ATM pusat sebesar Rp30.300.000,- Kas Cabang Bantul sebesar Rp238.535.900,- dan Kas Cabang Mangkubumi sebesar Rp288.556.300,-.

Maka dapat disimpulkan bahwa kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan PT BPR 3SUN dapat dibuktikan keberadaannya dan benar-benar dimiliki oleh klien. Bukti-bukti pendukung pengeluaran dan penerimaan kas dapat ditunjukkan dan sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam buku besar serta sah, yang ditunjukkan dengan otorisasi pada setiap transaksi. Seluruh kas yang dimiliki perusahaan pada neraca telah diungkapkan dalam neraca dan dicatat sebesar nilai realisasinya. Kas telah diungkapkan dalam

laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan SAK-ETAP.

Pemeriksaan Penempatan pada Bank Lain

Penanaman dana pada bank lain adalah setara kas yang dimiliki oleh PT BPR 3SUN dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pemeriksaan setara kas ini bertujuan untuk membuktikan keberadaan setara kas, kelengkapan pencatatan, hak kepemilikan klien, kewajaran penilaian, penyajian, dan pengungkapan setara kas dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan setara kas dilakukan oleh auditor dengan meminta rincian penempatan bank lain, meminta laporan rekonsiliasi bank dan rekening koran. Rincian penempatan pada bank lain pada tahun berjalan dicocokkan saldonya dengan buku besar. Kemudian data rekening koran ditelusuri oleh auditor untuk mencocokkan

antara saldo bank pada laporan per *book* klien dengan laporan per bank.

Dari hasil pemeriksaan setara kas oleh auditor, setara kas PT BPR 3SUN, penempatan pada bank lain terdapat perbedaan antara auditor dan klien, hal ini dikarenakan pencatatan klien atas pendapatan yang masih akan diterima pada rupa-rupa aset dengan pendapatan bunga yang masih akan diterima, dan penyisihan penghapusan pada kredit yang diberikan dengan penyisihan penghapusan

di penempatan pada bank lain menurut auditor tidak sesuai dengan SAK-ETAP. Dimana pendapatan yang masih akan diterima pada aset lain-lain merupakan pendapatan bunga yang akan diterima dan penyisihan penghapusan-kredit yang diberikan terdapat didalamnya penyisihan penghapusan-penempatan pada bank lain. Maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk reklasifikasi tersebut, reklasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Reklasifikasi dan Jurnal Penyesuaian

No	Keterangan	Debit	Kredit
		Rp	Rp
R-1	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Pendapatan yang Masih Akan Diterima-ALL Reklasifikasi atas Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima	1.329.325.564	1.329.325.564
R-2	Penyisihan Kerugian - Kredit yang diberikan Penyisihan Kerugian - Penempatan pada bank lain Koreksi atas perhitungan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain	56.886.668	56.886.668

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Meski demikian, reklasifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh PT BPR 3SUN.

Maka hasil pemeriksaan auditor menunjukkan bahwa setara kas penempatan pada bank lain sebesar Rp17.627.573.196,- dan pendapatan yang masih akan diterima sebesar Rp1.329.325.564,- Penempatan pada bank lain sebesar Rp17.627.573.196 terdiri dari giro sebesar Rp6.250.239.516,-, tabungan

sebesar Rp10.267.333.680,- dan deposito Rp1.110.000.000,- dengan penyisihan penghapusan sebesar Rp56.886.668,- merupakan 0,3% dari jumlah penempatan pada bank lain dimana nilai tersebut merupakan reklasifikasi dari penyisihan kerugian kredit yang diberikan. Dengan demikian jumlah bersih setara kas penempatan pada bank lain sebesar Rp17.570.686.528,-. Rincian penempatan pada bank lain dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Rincian Penempatan Pada Bank Lain

Keterangan	2014	2013
Giro	0	
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	188.108.669	8.695.758
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	4.506.886.836	1.673.312.175
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	219.319.149	129.430.201
PT. Bank Central Asia, Tbk.	573.059.209	2.931.655.633
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.	137.221.801	40.600.658
PT. Bank NISP, Tbk.	188.005.301	227.178.548
PT. Bank NISP, Tbk. (ATM)	154.818.174	-
PT. Bank Mega, Tbk.	280.034.076	29.108.112
PT. Bank Danamon, Tbk.	2.786.301	8.938.119
Tabungan:	-	-
PT. Bank Bukopin, Tbk.	3.254.755.284	1.350.120.771
PT. BPD Yogyakarta	355.228.903	341.225.951
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	113.791.860	1.138.547.920
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	1.500.000.000	-
PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.	222.301.555	193.208.887
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.213.444.069	300.382.558
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	4.287.053	-
PT. Bank APEX	8.011.498	7.588.192
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.	127.124.637	105.493.870
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.	1.063.930.232	-
PT BPR Karyajatnika Sadaya	4.983.712	5.107.016
PT BPR Karyajatnika Sadaya	113.803	-
PT. Bank Sinar Mas, Tbk.	1.142.107.650	1.807.339.175
PT. Bank Sinar Mas, Tbk.	4.391.220	-
PT. Bank Central Asia, Tbk.	411.714.819	92.552.778
PT. Bank Mega, Tbk.	517.189.466	60.159.831
PT. Bank Mega, Tbk	5.768.883	-
PT BPR Danagung Ramulti	57.077.546	4.057.725
PT BPR Danagung Abadi	18.079.140	38.913.556
PT. Bank MNC, Tbk	205.558.452	1.292.817.806
PT. Bank MNC	322.683	-
PT. Bank OCBC NISP, Tbk.	2.034.533	2.034.533
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk	32.463.871	3.676.109.366
PT. Bank Pundi	2.652.811	2.641.711
Deposito:	-	-
PT BPR Danagung Ramulti	10.000.000	10.000.000
PT BPR Artha Sumber Arum	200.000.000	200.000.000
PT. BPRS Danagung Syariah	100.000.000	100.000.000
PT BPR Bumi Karyapala	100.000.000	100.000.000
PT BPR Bumi Karyapala	50.000.000	50.000.000

PT BPR Ukabima NR	200.000.000	200.000.000
PT BPR Laestari Darmo N	50.000.000	50.000.000
PT BPR Tandu Artha	100.000.000	100.000.000
PT BPR Tandu Artha	100.000.000	100.000.000
PT BPR Alto Makmur	200.000.000	200.000.000
PT BPR Agra Arthaka	-	1.500.000.000
PT. Bank Daerah Gunung Kidul	-	1.000.000.000
Total	17.627.573.196	19.077.220.850
Penyisihan kerugian	(56.886.668)	(70.141.508)
Jumlah	17.570.686.528	19.007.079.342

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Pemeriksaan Kredit yang Diberikan

Pemeriksaan kredit yang diberikan bertujuan untuk membuktikan asersi manajemen mengenai kredit yang diberikan diantaranya adalah keberadaan kredit yang diberikan, kelengkapan pencatatan kredit yang diberikan, hak kepemilikan klien, kewajaran penilaian, penyajian, dan pengungkapan kredit yang diberikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP.

Langkah awal yang dilakukan dalam pemeriksaan kredit yang diberikan yaitu auditor meminta daftar nominatif kredit dan buku besar piutang. Kemudian auditor mencocokkan saldo akun yang termasuk dalam akun kredit yang diberikan kedalam buku besar, mencocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit pada tahun sebelumnya, serta memeriksa apakah ada akun yang tidak biasa. Kemudian auditor memisahkan kredit dengan jumlah yang signifikan untuk diminta surat perjanjian kreditnya.

Dalam pemeriksaan ini auditor juga menggunakan bukti pendukung berupa permintaan konfirmasi. Dalam melakukan konfirmasi, auditor memilih secara acak nasabah yang mempunyai saldo kredit yang bernilai material dan beberapa nasabah yang saldo kreditnya kurang material untuk

digunakan sebagai pembanding. Hasil konfirmasi tersebut, saldo yang dilaporkan manajemen dalam daftar nominatif sesuai dengan catatan nasabah.

Dari hasil pemeriksaan auditor atas kredit yang diberikan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan PT BPR 3SUN telah didukung dengan bukti yang memadai. Dengan kata lain, angka yang terdapat dalam laporan tersebut benar-benar ada dan telah diungkapkan secara keseluruhan oleh klien. Akan tetapi terdapat selisih atas kredit yang diberikan antara penyajian klien dengan hasil audit, hal ini karena terdapat perbedaan penyajian antara penyisihan penghapusan-penempatan pada bank lain dengan penyisihan penghapusan-kredit yang diberikan, sebagaimana pada tabel 3.4 di atas, dan kredit yang diberikan-provisi dengan kredit yang diberikan-provisi pada rupa-rupa aset.

Menurut auditor penyajian tersebut belum sesuai dengan SAK-ETAP, dimana KYD-Provisi kewajiban lain-lain adalah merupakan KYD-Provisi pada kredit yang diberikan-aset, maka perlu dilakukan reklasifikasi dan dibuatkan ayat jurnal penyesuaian atas reklasifikasi tersebut. Reklasifikasi dan ayat jurnal penyesuaian atas kredit yang diberikan-provisi dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Reklasifikasi dan Jurnal Penyesuaian

No.	Keterangan	Debit	Kredit
		RP	Rp
R-5	KLL - KYD Povisi KUB	521.804.449	
	KLL - KYD Povisi KUI	252.100.015	
	KLL - KYD Povisi KP	199.234.316	
	KLL - KYD Povisi KPM	3.539.872	
	KLL - KYD Povisi Kredit Multiguna	5.198.194	
	KLL - KYD Povisi Kredit Rekening Koran	3.583.328	
	Kredit yang diberikan – Provisi		985.460.174
	Reklasifikasi atas kredit yang diberikan – provisi		

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Berdasarkan hasil audit, kredit yang diberikan sebesar Rp102.008.016.085,-, terdiri dari kredit yang diberikan-provisi sebesar Rp985.460.174,- dan dengan adanya reklasifikasi penyisihan penghapusan maka penyisihan penghapusan sebesar Rp1.105.585.000,- menjadi Rp1.048.698.332,- maka jumlah bersih kredit yang diberikan sebesar Rp99.973.857.579,-. Rincian kredit yang diberikan oleh PT BPR 3SUN seperti yang terdapat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Rincian Kredit Yang Diberikan

Jenis kredit	2014	2013
<i>Pihak hubungan istimewa:</i>	-	21,444,780
<i>Pihak ketiga:</i>		
Kredit Umum Bulanan	43.985.858.793	33.327.561.734
Kredit Umum Insidentil	38.425.800.000	23.122.613.000
Proyek Kredit Mikro	50.803.523	146.026.751
Kredit Profesi	16.738.299.167	19.315.889.535
Kredit Pemilikan Motor	229.327.681	432.509.832
Kredit Pasar	1.669.725.241	6.98.280.256
Kredit Multi Guna	373.369.621	-
Kredit Rekening Koran	534.832.059	825.622.912
Jumlah pihak ketiga	102.008.016.085	84.152.504.020
Jumlah – pokok	102.008.016.085	84.173.948.800
Jumlah KYD-provisi	(985.460.174)	(1.003.445.242)
Jumlah KYD	101.022.555.911	83.170.503.558
Penyisihan Penghapusan	(1.048.698.332)	(1.351.056.492)
Jumlah Bersih	99.973.857.579	81.819.447.006

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Dari seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan auditor tidak menemukan hambatan, berdasarkan surat konfirmasi yang dikirim maka kredit yang diberikan benar-benar tagihan klien kepada nasabah, berdasarkan daftar nominatif kredit yang diberikan maka dapat disimpulkan bahwa telah diungkapkan secara keseluruhan dalam laporan keuangan dan dinyatakan sebesar nilai realisasinya, klien juga memiliki hak legal atas tagihan tersebut yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kredit. Secara keseluruhan penyajian kredit yang diberikan dapat dikatakan wajar.

Pemeriksaan Aset Tetap

Tujuan pemeriksaan aset tetap adalah membuktikan asersi manajemen yakni asersi keberadaan aset tetap (*Assertion Existence*), asersi kelengkapan pencatatan aset tetap (*Assertion Completeness*), asersi hak kepemilikan klien (*Assertion Valuation & Measurement*), asersi kewajaran penilaian, penyajian, dan asersi

pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan SAK-ETAP.

Dalam pengujian aset tetap langkah pertama yang dilakukan oleh auditor yaitu meminta rincian aset tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan periode berjalan berdasarkan kelompok aset. Auditor juga meminta rincian penambahan aset tetap kemudian auditor melakukan *vouching* terhadap bukti pendukung penambahan aset, kemudian berdasarkan data penambahan aset tetap tersebut auditor melakukan pemeriksaan fisik yang kemudian dicatat dalam BAP yang terdapat pada lampiran 6. Auditor juga memeriksa apakah perhitungan penyusutan telah dilaksanakan berdasarkan kelompok aset dan sesuai dengan SAK-ETAP.

Berdasarkan pemeriksaan auditor aset tetap untuk gedung dengan saldo awal Rp100.000.00,- dengan akumulasi penyusutan Rp36.250,011,- sehingga nilai buku atau saldo akhir sebesar Rp63.749.989,-. Untuk inventaris kantor

Tabel 7
Penyusutan Aset & Inventaris

Keterangan	2014	2013
Gedung	100.000.000	100.000.000
Kendaraan		1.763.573.000
Inventaris Kantor	5.353.995.585	2.231.787.960
Jml Perolehan	5.453.995.585	4.095.360.960
Akm. Penyusutan:		
Gedung	36.250.011	31.250.007
Kendaraan		1.082.453.893
Inventaris Kantor	3.210.434.069	1.527.992.884
Jml Akm. Penys.	3.246.684.080	2.641.696.784
Nilai Buku		
Gedung	63.749.989	68.749.993
Kendaraan		681.119.107
Inventaris Kantor	2.143.561.516	703.795.076
Saldo Akhir	2.207.311.505	1.453.664.176

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

saldo awal sebesar Rp3.995.360.960 dan terdapat penambahan sebesar Rp1.358.634.625 sehingga saldo untuk inventaris kantor sampai Tahun 2014 adalah sebesar Rp5.353.995.585,- dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp3.210.434.069,- maka nilai buku atau saldo akhir untuk inventaris kantor sebesar Rp2.143.561.516. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7.

Setelah melakukan audit auditor menemukan bahwa seluruh aset yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai bukunya dan dapat dibuktikan keberadaannya termasuk penambahan aset tetap pada tahun berjalan. Klien juga memiliki hak legal atas aset tersebut yang ditunjukkan dengan bukti perolehan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Berdasarkan pemeriksaan, auditor memastikan bahwa perhitungan beban penyusutan aset tetap dan inventaris telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK-ETAP.

Pemeriksaan Kewajiban

Tujuan pemeriksaan kewajiban untuk membuktikan bahwa biaya yang masih harus dibayar yang terdapat dalam neraca adalah benar-benar ada dan merupakan beban yang terhutang pada neraca, membuktikan bahwa pencatatan telah dilakukan dengan lengkap, kewajaran penilaian, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan SAK-ETAP.

Pemeriksaan kewajiban dilakukan dengan meneliti kecukupan dan pelaksanaan atas kebijakan dan pengendalian dalam pengelolaan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Kemudian auditor meminta rincian kewajiban untuk diklasifikasikan ulang penjumlahan dari rincian kewajiban segera tersebut. Selain mengklasifikasi ulang kewajiban, auditor juga memeriksa

perjanjian atas kewajiban. Selanjutnya auditor meminta daftar kewajiban mulai dari titipan pajak bunga tabungan, titipan pajak bunga deposito, dan titipan nasabah yang bersangkutan dengan kewajiban yang ada di laporan hasil usaha. Setelah mendapatkan daftar tersebut, auditor memeriksa apabila ada kewajiban yang seharusnya diakui pada periode berjalan tetapi langsung dibebankan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Dari hasil pemeriksaan auditor, kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan kewajiban yang terhutang pada neraca dan benar-benar ada, yang ditunjukkan dengan bukti kas masuk. Namun dari pemeriksaan auditor terdapat perbedaan pada klasifikasi atas penyajian utang bunga dengan biaya bunga yang masih harus dibayar pada rupa-rupa pasiva, utang pajak dengan taksiran utang pajak pada kewajiban lain-lain, dan provisi kredit pada kewajiban lain-lain dengan kredit yang diberikan-provisi. Menurut auditor penyajian tersebut tidak sesuai dengan SAK-ETAP, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atas reklasifikasi tersebut. Reklasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 8.

Reklasifikasi atas kredit yang diberikan provisi dapat dilihat pada tabel 3.7. Meski terdapat reklasifikasi yang dilakukan oleh auditor, hal tersebut tidak mengurangi kewajaran laporan keuangan klien. Dari hasil pemeriksaan kewajiban, kewajiban yang dimiliki oleh klien sebesar Rp109.993.445.338,- jumlah tersebut berbeda dengan yang disampaikan klien yakni sebesar Rp110.978.905.512,- atau selisih sebesar Rp985.460.178 yang merupakan hasil dari reklasifikasi. Rincian kewajiban dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 8
Reklasifikasi & Jurnal Penyesuaian

No.	Keterangan	Debit	Kredit
		Rp	Rp
R-2	KLL - Biaya yang masih harus dibayar Utang Bunga Reklasifikasi atas utang bunga	369.676.661	369.676.661
R-3	KLL - Taksiran Pajak PPh Utang Pajak Reklasifikasi atas utang pajak	401.778.214	401.778.214

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Tabel 9
Rincian Kewajiban

Keterangan	2014	2013
Kewajiban segera	138.770.861	112.668.849
Utang bunga	369.676.661	-
Utang pajak	401.778.214	-
Simpanan	105.246.907.923	91.547.255.392
Simpanan dari bank lain	113.469.108	1.546.980.255
Pinjaman diterima	3.549.633.192	-
Kewajiban lain-lain	173.209.379	615.263.454
Jumlah kewajiban	109.993.445.338	93.822.167.950

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban sebesar Rp109.993.445.338,- adalah benar-benar dan merupakan beban yang terhutang pada neraca, seluruh biaya yang masih harus dibayar telah lengkap dan sesuai serta telah dimasukkan dalam neraca perusahaan, perusahaan memiliki hak legal atas seluruh kewajiban yang masih harus dibayar.

Maka dapat dikatakan bahwa penyajian kewajiban telah sesuai dengan SAK-ETAP.

Pemeriksaan Ekuitas

Tujuan pemeriksaan ekuitas adalah memastikan keberadaan modal yang dimiliki perusahaan dan telah diungkapkan di dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK-ETAP).

Dalam pemeriksaan ekuitas, auditor pertamakali meminta rincian modal saham PT BPR 3SUN pada neraca dan memeriksa ketepatan perhitungan matematis modal

tersebut. Setelah memastikan bahwa perhitungan klien benar tidaknya, auditor membandingkan jumlah modal dari daftar rincian dengan saldo yang ada di buku besar. Auditor juga meminta bukti pendukung berupa akta notaris dan membuat konfirmasi kepada para pemegang saham.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor menemukan bahwa berdasarkan akta pendirian, modal awal PT BPR 3SUN pada saat diakuisisi sebesar Rp100.000.000,- terdiri dari 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000,- per lembar saham. Modal dasar PT BPR 3SUN telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir terjadi pada 28 April 2009 dimana modal dasar perusahaan menjadi Rp10.000.000.000,- yang terbagi atas 20.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham dan pada 15 Juli 2014 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp1.350.000.000,-.

Dengan akta pada 15 Juli 2014 No.6 oleh notaris Tri Agus Heryono,SH modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar 12.900 lembar saham atau senilai Rp6.450.000.000,- dan modal saham belum disetor sebesar Rp3.550.000.000.

Setelah melakukan pemeriksaan auditor berkesimpulan bahwa ekuitas PT BPR 3SUN adalah benar-benar ada dan dimiliki perusahaan yang dibuktikan dengan akta notaris, hasil rapat umum pemegang saham (notulen rapat) dan perubahan anggaran dasar. Ekuitas sebesar Rp6.450.000.000 telah dinyatakan secara lengkap dan wajar dalam laporan keuangan PT BPR 3SUN dan sesuai dengan SAK-ETAP.

Pemeriksaan Pendapatan

Pemeriksaan pendapatan adalah usaha auditor untuk membuktikan keberadaan pendapatan bahwa seluruh pendapatan

dalam laba rugi adalah benar-benar terjadi, pembuktian berikutnya adalah pembuktian bahwa seluruh pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar pendapatan yang ada dan telah diakui seluruhnya selama periode berjalan, pembuktian terakhir adalah auditor membuktikan bahwa jumlah yang dinyatakan dalam laporan keuangan adalah nilai yang tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Pertama-tama dalam melakukan pemeriksaan pendapatan auditor meminta rincian pendapatan dan bukti transaksi yang telah dipilih sebagai *sample*. Kemudian auditor melakukan *vouching*, hasil pemeriksaan auditor tidak menemukan kesalahan yang material terhadap bukti kas masuk.

Kemudian auditor melakukan kalkulasi hasil penjumlahan dibuku besar mengenai pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional. Selain mengkalkulasi ulang, auditor juga meneliti apakah ada nilai yang tidak wajar dalam akun-akun buku besar tersebut. Auditor juga tidak menemukan kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh manajemen, serta tidak menemukannya angka-angka yang tidak wajar di dalam buku besar tersebut.

Selanjutnya auditor mencocokkan saldo yang ada pada laporan hasil usaha dengan saldo yang ada dalam buku besar perusahaan. Dalam pemeriksaan ini auditor tidak menemukan adanya selisih atas pencatatan pendapatan yang dibuat oleh manajemen. Saldo per audit dan saldo per *book* mengenai pendapatan menunjukkan angka Rp23.728.665.984,-

Auditor berkesimpulan bahwa seluruh pendapatan yang dilaporkan adalah benar terjadi dan ada serta merupakan pendapatan barang atau jasa yang diberikan kepada nasabah dan pihak ketiga selama

periode berjalan. Pendapatan PT BPR 3SUN yang tercatat dalam laporan hasil usaha telah seluruhnya dari pendapatan yang ada selama periode berjalan dan

merupakan nilai yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi (SAK-ETAP). Rincian pendapatan yang diterima PT BPR 3SUN dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10
Rincian Pendapatan PT BPR 3SUN

Keterangan	Per Audit 2014	Per Audit 2013
Pendapatan Bunga:		
Bunga Giro	38.812.983	57.043.329
Bunga tabungan dan deposito	569.475.366	808.913.892
Bunga Kredit KUB	8.964.195.890	6.479.993.113
Bunga Kredit KUI	6.639.289.397	4.576.754.878
Bunga Kredit PKM	1.839.277	11.890.924
Bunga Kredit Profesi	3.152.611.786	4.118.447.084
Bunga Kredit KPM	102.615.119	127.531.616
Bunga Kredit KPH	816.916.558	2.224.930.474
Bunga Kredit Multiguna	30.661.730	-
Bunga Kredit Rekening Koran	166.853.568	243.143.369
Provisi	1.248.330.343	1.302.393.110
Pendapatan operasional lainnya	1.915.550.350	1.697.507.392
Pendapatan non operasional	81.513.617	2.293.449.643
Jumlah Pendapatan	23.728.665.984	23.941.998.824

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Pemeriksaan Beban

Tujuan pemeriksaan beban adalah untuk membuktikan bahwa biaya dan beban yang dicatat merupakan biaya dan beban perusahaan (*existence*), semua biaya dan beban telah dicatat dengan lengkap dan benar, semua biaya dan beban telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan (*Presentation & disclosure*) dan sesuai dengan prinsip akuntansi (SAK-ETAP).

Pemeriksaan beban pertama kali yang dilakukan auditor adalah dengan meminta rincian beban usaha dan bukti transaksi mengenai kas keluar yang sudah dipilih oleh auditor sebagai *sample*. Kemudian auditor mengidentifikasi dan melakukan *vouching* terhadap *sample* bukti kas keluar,

hal ini dilakukan pada pemeriksaan beban personalia, beban umum administrasi, beban barang dan jasa, beban bunga, beban operasional lainnya dan beban non operasional.

Selama melakukan *vouching* auditor tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan maupun transaksi yang belum dicatat, serta tidak menemukan adanya transaksi yang dinilai tidak wajar. Setelah melakukan *vouching* auditor mencocokkan saldo beban yang ada di laporan hasil usaha ke buku besar. Dari hasil pemeriksaan beban, beban PT BPR 3SUN sebesar Rp19.509.617.331,-.

Kesimpulan pemeriksaan bahwa beban PT BPR 3SUN yang disajikan dalam laporan hasil usaha sebesar

Rp19.509.617.331,- merupakan benar-benar beban PT BPR 3SUN selama periode berjalan dan dicatat dengan lengkap dan benar, semua beban dalam laporan

keuangan telah diungkapkan dengan benar sesuai prinsip akuntansi. Berikut rincian beban PT BPR 3SUN seperti terdapat dalam tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11
Rincian Beban PT BPR 3SUN

Keterangan	Per Audit 2014	Per Audit 2013
Beban Bunga	8.279.523.227	7.606.782.282
Beban Administrasi dan Umum	8.917.497.579	8.371.716.522
Bbn.Penyisihan Kerugian/Penyusutan	1.128.950.096	808.913.892
Beban Non Operasional	184.437.615	2.318.132.619
Beban Pajak	999.208.814	965.473.190
Jumlah Beban	19.509.617.331	20.071.018.505

Sumber: Kertas Kerja Audit KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta

Tahap Pelaporan

Setelah seluruh prosedur audit dilaksanakan dan pembuatan kertas kerja sudah selesai, tahap selanjutnya dalam pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pada tahap ini auditor menyusun *draft* audit laporan keuangan terlebih dahulu, *draft* ini berisi tentang hasil pemeriksaan dan informasi-informasi tambahan yang telah didiskusikan oleh semua tim audit PT BPR 3SUN dan menarik kesimpulan secara menyeluruh.

Selanjutnya *draft* tersebut harus diperiksa dan disetujui oleh *supervisor* sebelum disampaikan kepada klien untuk mencapai kesepakatan. Setelah mendapatkan kesepakatan dan tidak ada sanggahan dari pihak klien, kemudian auditor dapat menyusun Laporan Audit Independen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan keuangan yang dibuat tim audit terhadap laporan keuangan yang di buat oleh PT BPR 3SUN menyatakan bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh auditor adalah wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan PT BPR 3SUN pada 31 Desember 2014, hasil usaha, arus kas yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tahapan audit yang dilakukan oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta dalam pelaksanaan auditnya terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu tahap penerimaan penugasan audit, tahap perencanaan audit, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap pelaporan hasil audit. Tahapan pertama yakni tahap penerimaan penugasan dilakukan auditor dengan mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing, mengevaluasi independensi, pengambilan keputusan menerima atau menolak perikatan audit, dan menyiapkan surat penugasan.

Pada tahapan perencanaan audit yang dilaksanakan oleh *dbsd&a* adalah dengan

menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien, prosedur analitik, melakukan penilaian awal terhadap materialitas, menilai risiko audit, mengembangkan strategi audit pendahuluan, menghimpun pemahaman pengendalian intern klien (bagi klien baru), menyusun program audit kemudian dilanjutkan dengan tahap pekerjaan lapangan yakni auditor melakukan pemeriksaan terhadap akun-akun yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi klien.

Tahap akhir adalah pelaporan, pada tahap ini auditor menyusun *draft* yang kemudian diperiksa oleh *supervisor* sebelum disampaikan kepada klien bila tidak terdapat sanggahan dari klien barulah auditor menerbitkan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan klien. Dalam laporan tersebut penting bagi auditor untuk menyatakan pendapat secara menyeluruh tentang laporan keuangan yang disusun oleh klien dan mencantumkan tentang lingkup tanggung jawab auditor.

Keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta telah memenuhi standar umum auditing, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan hasil audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Dari proses keterlibatan penulis dalam pelaksanaan audit penulis menemukan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan klien dalam penyajian laporan keuangan yang bila mana mengikuti saran audit pada periode sebelumnya kesalahan tersebut tidak perlu terjadi.

Saran

Saran penulis, KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta yang melibatkan auditor

junior dari tenaga magang sebaiknya dilibatkan dalam tahap perencanaan dan di supervisi dengan sebaik-baiknya agar auditor junior memiliki gambaran tentang pekerjaan lapangan dan tidak salah dalam mengambil tindakan. Sebagai proses pembelajaran auditor junior sebaiknya diberikan kesempatan dan tanggung jawab yang lebih tentunya dengan supervisi dan *mentoring* yang baik.

Saran yang dapat penulis sampaikan bagi klien KAP *dbsd&a* Cabang Yogyakarta adalah lebih memperhatikan Laporan Auditor Independen yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPR 3SUN. *Company Profile*. Yogyakarta Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan public* Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Menteng.
- Jusup, AL Haryono. 2010. *Auditing*. Jilid 1. Edisi 4. Yogyakarta: BPSTIE YKPN.
- KAP *dbsd&a*. *Company Profile: Member Of BKR International*. Yogyakarta.
- KAP *dbsd&a*. *Kertas Kerja Pemeriksaan BPR 3SUN*. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2011. *Auditing*. Buku Satu. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Bank Indonesia Tanggal 1 Juni 2010 Perihal *Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 Tahun 2006 Tentang *Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang *Bank Indonesia*.